

SINOPSIS

Dengan adanya otonomi daerah sebagai penciptaan desentralisasi, maka tiap-tiap daerah dipacu untuk meningkatkan potensi yang dimiliki oleh daerahnya sendiri. Rembang merupakan daerah pesisir yang mana di dalamnya terdapat sumber daya alam yang melimpah khususnya sumber daya alat kelautan. Sehingga Rembang merupakan salah satu daerah penghasil garam di Indonesia. Rendahnya tingkat kesejahteraan petani garam di Desa Tambak Agung Kecamatan Kaliore Kabupaten Rembang dalam pengelolaan potensi sumber daya alam yang ada, hal ini diakibatkan karena kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah belum dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat petani garam. Pemerintah dalam hal ini Diperindakop sebagai dinas yang menaungi masyarakat petani garam belum secara maksimal melakukan pemberdayaan kepada petani garam dalam peningkatan kesejahteraan. Padahal apabila dilihat dengan fungsi dan tugas dari lembaga eksekutif salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat, tetapi dalam kenyataannya masyarakat petani garam selalu tidak mampu untuk berbuat apa-apa dalam menghadapi segala benturan saingan baik dalam negeri maupun luar negeri. Sehingga dalam penelitian permasalahan yang ada adalah bagaimana peran Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Garam di Desa Tambak Agung Kecamatan Kaliore Kabupaten Rembang.

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini dianalisa dengan menggunakan pendekatan *analisis kualitatif deskriptif*. Data diperoleh melalui wawancara petani garam di Desa Tambak Agung. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan *teknik Purposive Random Sampling* (dilakukan secara acak dari banyaknya pemilik tambak dan Perombong/Penggarap).

Berdasarkan data yang didapat maka diperoleh hasil penelitian bahwa pemerintah daerah khususnya Diperindagkop Kabupaten Rembang kurang memperhatikan peningkatan kesejahteraan masyarakat petani garam di Desa Tambak Agung. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah masih meletakkan posisinya secara penuh dalam mengendalikan kekuasaan, sedangkan masyarakat berada pada posisi sebaliknya. Yang menyebabkan masyarakat tidak berdaya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki baik SDA maupun SDM yang dimilikinya. adapun peran diperindagkop antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani garam.

Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang dalam memberikan pengertian serta kesadaran kepada petani garam dalam pelaksanaan produksi garam dapat dikatakan kurang optimal dalam penyampaian peningkatan kesejahteraan masyarakat petani garam. Hal ini disebabkan pemerintah daerah Kabupaten Rembang kurang maksimal dalam mencari strategi-strategi baru dalam pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan kondisi kultur masyarakat, letak geografis dan kesadaran masyarakat. Pemerintah daerah Kabupaten Rembang melalui Diperindagkop belum dapat melaksanakan pemberdayaan masyarakat secara optimal, sesuai dengan potensi